



**BUPATI HULU SUNGAI TENGAH  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH  
NOMOR 8 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH TAHUN ANGGARAN 2020**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,**

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan dengan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) ;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ( Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438 );
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049)

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6187);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679 );
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);.
14. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012

Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272) ;

16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) ;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah dirubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 15);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020
25. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan

- Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

dan

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH TAHUN ANGGARAN 2020.

**Pasal 1**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan	Rp.1.210.370.713.557,00
2. Belanja	<u>Rp.1.345.891.846.502,00</u>
Surplus/(Defisit)	Rp.(135.521.132.945,00)
3. Pembiayaan :	
a. Penerimaan	Rp.135.521.132.945,00
b. Pengeluaran	<u>Rp.                    0,00</u>
Pembiayaan Netto	Rp.135.521.132.945,00

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun berkenaan Rp.0.00

**Pasal 2**

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari:

a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah	Rp.120.842.980.641,00
b. Dana Perimbangan sejumlah	Rp.850.358.210.000,00
c. Lain-lain Pendapatan daerah Yang sah sejumlah	Rp.239.169.522.916,00

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

- |   |                      |
|---|----------------------|
| a. Pajak Daerah sejumlah                                    | Rp.13.156.872.000,00 |
| b. Retribusi daerah sejumlah                                | Rp.11.835.487.561,00 |
| c. Hasil Pengelolaan kekayaan Daerah yg dipisahkan sejumlah | Rp. 7.300.000.000,00 |
| d. Lain-lain pendapatan asli Daerah Yang sah sejumlah       | Rp.88.550.621.080,00 |
- (3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :
- |                                 |                       |
|---------------------------------|-----------------------|
| a. Dana bagi hasil sejumlah     | Rp.126.570.120.000,00 |
| b. Dana alokasi umum sejumlah   | Rp.545.103.068.000,00 |
| c. Dana alokasi khusus sejumlah | Rp.178.685.022.000,00 |
- (4) Lain-lain pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :
- |  |                       |
|--|-----------------------|
| a. Hibah sejumlah  | Rp.148.677.891.000,00 |
| b. Dana Darurat sejumlah   | Rp. 0,00              |
| c. Dana bagi Hasil Pajak sejumlah  | Rp. 80.607.261.916,00 |
| d. Dana penyesuaian dan Otonomi Khusus sejumlah                                | Rp. 9.884.370.000,00  |
| e. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah daerah lainnya sejumlah | Rp. 0,00              |

### **Pasal 3**

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :
- |                                    |                       |
|------------------------------------|-----------------------|
| a. Belanja Tidak Langsung sejumlah | Rp.797.394.422.210,00 |
| b. Belanja Langsung sejumlah       | Rp.548.497.424.292,00 |
- (2) Belanja tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :
- |                                      |                       |
|--------------------------------------|-----------------------|
| a. Belanja Pegawai sejumlah          | Rp.535.556.121.979,00 |
| b. Belanja bunga sejumlah            | Rp. 0,00              |
| c. Belanja subsidi sejumlah          | Rp. 0,00              |
| d. Belanja hibah sejumlah            | Rp. 47.895.917.725,00 |
| e. Belanja bantuan sosial sejumlah   | Rp. 9.879.650.000,00  |
| f. Belanja bagi hasil sejumlah       | Rp. 2.499.235.956,00  |
| g. Belanja bantuan keuangan sejumlah | Rp.199.230.633.050,00 |
| h. Belanja tidak terduga sejumlah    | Rp. 2.332.863.500,00  |
- (3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :
- |                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| a. Belanja Pegawai Sejumlah         | Rp. 27.316.947.434,00 |
| b. Belanja Barang dan jasa sejumlah | Rp.335.203.867.410,00 |
| c. Belanja Modal sejumlah           | Rp.185.976.609.448,00 |

#### **Pasal 4**

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :

a. Penerimaan sejumlah	Rp.135.521.132.945,00
b. Pengeluaran Sejumlah	Rp. 0,00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan:

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SILPA) sejumlah	Rp.135.521.132.945,00
b. Pencairan dana cadangan sejumlah	Rp. 0,00
c. Hasil penjualan kekayaan Daerah yang Dipisahkan sejumlah	Rp. 0,00
d. Penerimaan Pinjaman Daerah sejumlah	Rp. 0,00
e. Penerimaan kembali penyertaan Modal sejumlah	Rp. 0,00
f. Penerimaan piutang Daerah sejumlah	Rp. 0,00

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Pembentukan dana cadangan sejumlah	Rp. 0,00
b. Penyertaan Modal (investasi ) Pemerintah Daerah Sejumlah	Rp. 0,00
c. Pembayaran Pokok Utang sejumlah	Rp. 0,00
d. Pemberian Pinjaman Daerah sejumlah	Rp. 0,00

#### **Pasal 5**

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini , terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
2. Lampiran II Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi;
3. Lampiran III Rincian APBD menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan ;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, program dan kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah untuk keselarsan dan keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam kerangka Pengelolaan Keuangan Daerah ;
6. Lampiran VI Daftar jumlah Pegawai Per Golongan dan Per jabatan ;
7. Lampiran VII Daftar Piutang Daerah ;
8. Lampiran VIII Daftar Investasi (Penyertaan Modal) Daerah ;

9. Lampiran IX	Daftar Perkiraan Penambahan dan pengurangan Aset Tetap Daerah ;
10.Lampiran X	Daftar Perkiraan Penambahan dan pengurangan Aset lainnya ; dan
11.Lampiran XI	Daftar kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam Tahun Anggaran ini;
12.Lampiran XII	Daftar Dana Cadangan Daerah, dan ;
13.Lampiran XIII	Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah ;

### **Pasal 6**

- (1) Dalam Hal Keadaan Darurat, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya. diusulkan dalam Rancangan Perubahan APBD;
- (2) Keadaan Darurat sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut :
  - a. Bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksi sebelumnya.
  - b. Tidak diharapkan terjadi secara berulang.
  - c. Berada di luar Kendali dan pengaruh Pemerintah Daerah.
  - d. Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.

Dalam hal Pendanaan Keadaan Darurat tersebut belum tersedia anggarannya dapat menggunakan Belanja Tidak Terduga;

- (3) Dalam Hal keadaan darurat terjadi setelah ditetapkannya Perubahan APBD, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, dan pengeluaran tersebut disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran;
- (4) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) termasuk Belanja untuk Keperluan Mendesak;
- (5) Kriteria Belanja untuk Keperluan Mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mencakup :
  - a. Program dan Kegiatan Pelayanan Dasar Masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
  - b. Keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat;

### **Pasal 7**

Ketentuan lebih lanjut mengenai penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 diatur dengan Peraturan Bupati

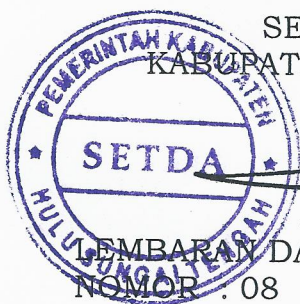
**Pasal 8**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Ditetapkan di Barabai  
pada tanggal 26 Desember 2019

The seal of Kabupaten Hulu Sungai Tengah, featuring a Garuda emblem in the center, surrounded by the text "KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH".  
BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,  
  
ACHAIRANSYAH

Diundangkan di Barabai  
Pada tanggal 26 Desember 2019



SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

  
AKHMAD TAMZIL

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH TAHUN 2019  
NOMOR . 08

NOMOR REGESTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN : (9,132/2019)





## PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

## RINGKASAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2020

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
1	<b>PENDAPATAN</b>	1.210.370.713.557,00
1.1	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	120.842.980.641,00
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	13.156.872.000,00
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	11.835.487.561,00
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	7.300.000.000,00
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	88.550.621.080,00
1.2	<b>DANA PERIMBANGAN</b>	850.358.210.000,00
1.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	126.570.120.000,00
1.2.2	Dana Alokasi Umum	545.103.068.000,00
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	178.685.022.000,00
1.3	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	239.169.522.916,00
1.3.1	Pendapatan Hibah	148.677.891.000,00
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	80.607.261.916,00
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	9.884.370.000,00
2	<b>BELANJA</b>	1.345.891.846.502,00
2.1	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	797.394.422.210,00
2.1.1	Belanja Pegawai	535.556.121.979,00
2.1.4	Belanja Hibah	47.895.917.725,00
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	9.879.650.000,00
2.1.6	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	2.499.235.956,00
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	199.230.633.050,00
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	2.332.863.500,00
2.2	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	548.497.424.292,00
2.2.1	Belanja Pegawai	27.316.947.434,00
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	335.203.867.410,00
2.2.3	Belanja Modal	185.976.609.448,00
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	(135.521.132.945,00)
3	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>	
3.1	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	135.521.132.945,00
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	135.521.132.945,00
	<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	135.521.132.945,00
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN</b>	0,00

Barabai, 26 Desember 2019

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH

Drs. H. A. CHAIRANSYAH